

Pengalaman Akulturasi dan Resolusi Konflik Warga Keturunan Tionghoa di Semarang

Slamet Subekti

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275
Email: slamet.subekti@live.undip.ac.id

Abstract

This case study seeks to reveal the acculturation experience some residents Chinese descent in Semarang. The data collection is done by conducting in-depth interviews with three informants selected, complemented by interviews with a priest in order to gain insights into conflict resolution within the framework of multiculturalism. Key to conflict resolution is the synergic cooperation between the government, security, local religious and tribal leaders. Acculturation as a method of receiving and cultural assimilation became one of alternative conflict prevention. The informant chose multiculturalism as a strategy of acculturation. Communication patterns are tolerant and philosophical values of Pancasila should be developed and cultivated to realize multiculturalism.

Key words: *Acculturation, Multiculturalism, Chinese Community*

1. Pendahuluan

Kajian tentang akulturasi ini bertolak dari kondisi bangsa Indonesia yang multi-etnik. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bentuk konflik etnisitas dengan isu perbedaan suku, agama maupun antar golongan (SARA). Sehubungan dengan itu, warga keturunan Tionghwa dalam posisi sebagai komponen bangsa ini tidak dapat menghindarkan diri dari dinamika akulturasi tersebut.

Kajian terdahulu dengan pendekatan metode etnografi tentang pola interaksi sosial dan budaya di kalangan keturunan Tionghwa Semarang menuju integrasi Indonesia di era Reformasi telah dilakukan oleh Alkatiri dkk. (2015). Kolaborasi peneliti dari Departemen Sejarah dan Departemen Kajian Wilayah UI tersebut menyimpulkan bahwa komunitas Tionghwa telah berinteraksi dengan masyarakat lokal selama beberapa generasi sehingga menciptakan satu pola sosial dan budaya campuran antara komunitas keturunan Tionghwa di Semarang dengan budaya lokal masyarakat Jawa. Hasil kajian tersebut memberikan satu contoh kasus kegagalan usaha integrasi nasional di kalangan komunitas yang berbeda di Indonesia dan menunjukkan ketegangan di antara komunitas minoritas dan mayoritas maupun di antara pemeluk Islam dan non Islam.

Tulisan ini mendeskripsikan pengalaman berakulturasi yang dihadapi oleh tiga warga keturunan Tionghwa. Selanjutnya diungkapkan wawasan mengenai resolusi konflik dari warga keturunan Tionghwa tersebut serta seorang rohaniwan. Akhirnya ditelisik pola komunikasi dan nilai budaya sebagai perekat bangsa dengan kondisi multi-etnik ini.

2. Metode

Berbeda dengan kajian Alkatiri dkk. tersebut di atas, studi kasus (2017) ini berusaha untuk mengungkapkan pengalaman akulturasi sebagian warga keturunan Tionghwa di kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan tiga informan terpilih. Pengumpulan data dilengkapi hasil wawancara dengan seorang rohaniawan guna mendapatkan wawasan tentang resolusi konflik dalam bingkai multikulturalisme.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindak Akulturasi

3.1.1 Tradisi sebagai Identitas Budaya

Pentingnya tradisi sebagai identitas budaya ditegaskan oleh Hendrick Setiawan (52 tahun) sebagai warga keturunan Tionghwa di Semarang, karena tradisi budaya tersebut merupakan warisan nenek moyang dan diyakini mengajarkan budaya yang baik. Warga keturunan Tionghwa yang lain Ratna Hapsari (37 tahun) melakukan tradisi tetapi tidak sering, karena kehidupan sehari-hari berpola kehidupan keluarga nasional seperti pada umumnya. Tradisi budaya etnis dilakukan jika ada peristiwa khusus, seperti: kematian, kelahiran, dan pernikahan.

Menurut perkiraan Lie Han Hwa (56 tahun) bahwa warga keturunan Tionghwa pada umumnya masih menjalankan tradisi sekitar 30 persen, karena banyak budaya yang sudah hilang. Tradisi yang lazim dijalankan di lingkungan keluarga Lie Han Hwa, antara lain: *Sin Chia* dengan menyediakan *angpao*, mengecat baru rumah dan *sungkeman*. Perayaan ini seperti *Thanksgiving and Wishing*, intinya menyampaikan ucapan terima kasih karena diberi hidup sampai hari ini dan kemudian menaruh harapan untuk kehidupan besok yang lebih baik. Faktanya kondisi sebenarnya sama, bahkan lebih buruk karena penghasilan berkurang dan sebagainya.

Lie Han Hwa menduga sekitar 90% warga keturunan Tionghwa di Semarang tidak paham budaya mereka sendiri. Mereka di Klenteng memuja dewa pengobatan Ho Tek Cing Sie misalnya, tetapi tidak mengenal baik tokoh tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran sejarah tentang dewa-dewa, karena sebenarnya mereka tokoh yang pernah hidup dan berbuat kebajikan. Hal menarik seperti di klenteng Lasem misalnya, terdapat patung dewa bule (berkulit putih), dan di klenteng Purwodadi Grobogan terdapat patung Yesus.

3.1.2 Interaksi Sosial

Interaksi warga keturunan Tionghwa dengan tetangga menurut pengalaman Hendrick Setiawan berjalan sangat baik, karena selama ini berinteraksi dengan banyak suku bangsa atau etnis, seperti etnis Tionghwa, Jawa, Batak dan sebagainya. Ratna Hapsari melakukan interaksi dengan tetangga secara tidak berlebihan, lazimnya menjenguk tetangga yang sakit, melayat tetangga yang meninggal, mengikuti arisan RT, berpartisipasi pada acara 17 Agustus-an, dan lain-lain. Akan tetapi, dia tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk mengobrol hal tidak penting hingga berjam-jam dengan tetangga.

Sementara itu pengalaman Lie Han Hwa berinteraksi dengan tetangga berjalan baik, selama ini tidak ada masalah yang berarti. Menurut pengalaman Hendrick Setiawan bahkan interaksi dengan tetangga berjalan sangat baik, misalnya waktu acara hari raya banyak dari

etnis lain memberikan selamat. Lain halnya dengan pengalaman Ratna Hapsari dalam berinteraksi dengan etnis lain berjalan biasa saja, sama seperti ketika berinteraksi dengan etnisnya sendiri. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dia tidak pernah berpikir tentang etnis melainkan lebih memandang orang lain sebagai sesama manusia.

3.1.3 Tanggapan Isu Perbedaan

Tanggapan atas tradisi atau budaya etnis lain menurut pengalaman Hendrick Setiawan berjalan baik sekali, misalnya pada waktu puasa, dan hari raya saling bertoleransi. Ratna Hapsari memandang tradisi atau budaya etnis lain itu bagus. Dia senang melihat ritual tradisi atau budaya dari segala macam etnis di Indonesia. Lie Han Hwa menyadari hidup dalam keberagaman, maka tradisi yang dimiliki etnis manapun perlu dihargai.

Berkenaan dengan tanggapan dari etnis lain, pengalaman Hendrick Setiawan baik sekali, karena antar etnis dapat berbaur menjadi satu –contohnya di pasar Gang Baru daerah Pecinan. Pengalaman Ratna Hapsari yang terlahir dari dua etnis berbeda, ayahnya keturunan Tionghwa dan ibunya Jawa. Dia jarang mendengar masing-masing etnis saling memandang miring. Sekiranya ada, itu terjadi karena secara pribadi kurang mengenal satu dengan lainnya. Lie Han Hwa memandang wajar sekiranya ada pihak yang mempunyai kesan baik, tetapi ada juga pihak yang mempunyai kesan buruk. Menurutnya tanggapan tersebut dapat dijadikan introspeksi agar kita menjadi lebih baik.

Selama ini Hendrick Setiawan tidak menerima tanggapan miring terhadap etnis Tionghwa. Pada dasarnya orang-orang yang dia kenal dari etnis manapun pada dasarnya sama, meskipun dikemas dalam balutan fisik yang berbeda. Pengalaman Ratna Hapsari menunjukkan tanggapan yang sama, dalam artian ada yang baik tetapi ada yang nyinyir, ada yang pemalu tetapi ada yang pemberani, ada yang rajin, ada yang malas, dan lain-lain. Menurut dia, orang jangan “sungkan” untuk bersedia mengenal dan dikenali.

Pengalaman realistik diungkapkan oleh Lie Han Hwa bahwa tanggapan miring mesti ada, karena orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Pendapat tersebut tidak lepas dari pengalaman mereka berinteraksi selama ini. Sebut saja, misalnya *stereotype* bahwa orang Tionghwa itu pelit dan eksklusif. Kita harus bersedia menerima kritik untuk introspeksi. Menurut dia kritik itu ada baiknya, meskipun tidak seratus persen benar. Maksudnya ada orang Tionghwa yang tidak pelit dan eksklusif. Sama seperti orang dari etnis manapun, mereka ada yang baik tetapi ada yang juga yang tidak baik.

Saling bertoleransi menurut Hendrick Setiawan merupakan kunci dalam menjaga hubungan baik dengan etnis lain. Bagi Ratna Hapsari seyogyanya kita memperlakukan semua etnis sebagai sesama manusia, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia yang baik dan beradab. Toleransi dan mengasihi sebagaimana telah diajarkan oleh Guru-guru spiritual, menurut Lie Han Hwa merupakan jalan untuk menjaga hubungan baik dengan etnis lain.

3.1.4 Strategi Akulturasi

Sejauh pengalaman Hendrick Setiawan, Ratna Hapsari dan Lie Han Hwa berusaha mempertahankan identitas budaya etnis mereka dan pada waktu yang sama mereka berpartisipasi dalam budaya etnis lain. Multikulturalisme, dengan demikian mereka jadikan pilihan sebagai strategi akulturasi.

Hendrick Setiawan dan Ratna Hapsari memiliki persepsi bahwa Pemerintah mengakui dan menerima keaneka-ragaman nilai-nilai budaya. Sementara itu Lie Han Hwa mengkritisi bahwa masa Orde Baru menerapkan kebijakan asimilasi, meskipun Pemerintah mengklaim

mengakui dan menerima keaneka-ragaman nilai-nilai budaya. Akan tetapi sejak reformasi dirasakan kondisi lebih baik, kaum Tionghwa diberi ruang untuk menunjukkan identitas budayanya.

Hendrick Setiawan memiliki penilaian bahwa kebijakan Pemerintah berupa politik multikulturalisme itu efektif. Penilaian yang berbeda diberikan oleh Ratna Hapsari, bahwa selama ini pemerintah ambil andil dalam acara keaneka-ragaman agama maupun budaya. Pemerintah agak tidak jelas dalam menerapkan akulturasi, karena badan atau instansi pemerintah yang seharusnya bersifat nasional, sepertinya lebih mencondongkan diri pada kepercayaan atau agama tertentu. Tampaknya dalam hal ini agama dipandang sebagai bagian dari akulturasi. Penilaian kritis diberikan oleh Lie Han Hwa bahwa kebijakan pemerintah itu ditentukan oleh faktor politik. Menurut dia, kebijakan politik yang dahulu lebih didasari kekhawatiran apabila orang-orang Tionghwa akan menguasai berbagai bidang. Hal itu berbeda dengan kebijakan politik sekarang ini yang lebih terbuka.

3.2 Resolusi Konflik

3.2.1 Tanggapan atas Konflik Etnis

Menurut Lie Han Hwa bahwa zaman dahulu akulturasi budaya sudah berjalan bagus, misalnya pendatang China membawa barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga tidak ada konflik. Sebagaimana Yayasan Khong Kauw Hwee juga berusaha menjembatani kesenjangan sosial masyarakat Tionghwa (kaya) dan pribumi (miskin) dengan mendirikan sekolah. Keturunan Tionghwa mempunyai peran memperkecil *gap* lewat pendidikan, sehingga diharapkan mencapai saling mengerti.

Kondisi yang memicu konflik etnis berakar dari kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Kedatangan Kolonial membuat pengkotak-kotakan dengan perbedaan: China diberi ruang gerak di bidang ekonomi, sedangkan pribumi bekerja sebagai buruh. Perbedaan itu menimbulkan tumbuhnya eksklusivisme sendiri. Sebenarnya perbedaan agama dan ras itu hanya sebagai pelatuk (*triggor*). Seperti sekarang ini, reaksi terhadap Ahok bagaimanapun tidak dapat dilepaskan bahwa dia keturunan Tionghwa. Akan tetapi, orang tertentu pandai melakukan provokasi kemudian membawa masalah melebar, seperti anti-Ahok itu bukan gerakan murni tetapi mereka hanya dipakai untuk provokasi.

Berikut ini dua faktor, menurut Lie Han Hwa, yang merupakan pemicu konflik etnis. *Pertama*, kesenjangan ekonomi yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial. *Kedua*, pendidikan rendah sehingga sulit menerima perbedaan. Mereka maunya perbedaan itu disamakan, mengikuti yang sama. Manusia seperti itu mengikuti naluri hewani “kera” –suka hidup berkelompok dan serakah—menyebabkan egoisme kelompok tinggi. Lain ceritanya bila manusia mengikuti karakter “semut”. Seiring berjalannya waktu, yang *natural* semula baik kemudian dikotori oleh tangan politik. Fenomena ini terjadi masa Kolonialisme dan era Suharto, bahwa penampilan berbeda akan menjadi masalah, padahal sebenarnya perbedaan itu indah.

Sekarang ini fenomena tersebut tidak akan mudah terjadi, karena pendidikan sudah maju dan *melting world*. Di bidang ekonomi negara kita tidak mungkin berdiri sendiri tetapi membutuhkan pihak lain, dan di bidang ekonomi pribumi sudah maju (dahulu pelaku ekonomi 90% Tionghwa). Pengamatan dewasa ini, *Gathering* besar semen misalnya 80% pemainnya pribumi (dahulu 80% Tionghwa), memang dari 50 pemain semen untuk peringkat 1 sampai 10 besar adalah keturunan Tionghwa tetapi 11 sampai 50 besar adalah pribumi.

Kesenjangan ekonomi itu sebenarnya hanya terdapat di perkotaan, dimana toko-toko besar milik orang Tionghwa. Perkembangan perkotaan sekarang menjadi lain, seperti toko-

toko banyak dimiliki oleh pribumi. Sementara itu di perdesaan, pelaku ekonomi dikuasai oleh para haji untuk perdagangan pupuk, dan sektor pertanian. Perkembangan tersebut dapat mempersempit kesenjangan ekonomi pada gilirannya akan memunculkan akulturasi budaya. Apabila dahulu Tionghwa “Baba” datang ke Nusantara seorang diri (lajang) kemudian kawin dengan perempuan pribumi. Modus perkawinan silang itu telah memungkinkan warga multietnik saling berinteraksi budaya.

3.2.2 Tanggapan atas Resolusi Pemerintah

Sekarang ini persoalan konflik isinya bergeser ke isu-isu agama. Ini pengaruh isu-isu global, seperti konfrontasi Uni Eropa dan Timur Tengah dengan berbagai kepentingannya. Kawin campur sekarang terganjal dengan kebijakan Pemerintah dimana perkawinan harus sesuai dengan agamanya, tidak urung hal ini mempertajam konflik etnis.

Menurut Lie Han Hwa bahwa perbedaan antara agama Wahyu dan agama Budaya adalah agama Wahyu doktrinnya dibuat ketat, bukan oleh Guru-besar spiritualnya tetapi karena berjarak terlalu lama sehingga menimbulkan penafsiran di antara murid-muridnya sehingga melahirkan banyak sekte. Sementara agama Budaya mudah berakulturasi karena mudah menerima perbedaan. Akan tetapi, agama Budaya pun dimanipulasi lewat politik: kondisi harmoni atau disharmoni yang memainkan adalah para politisi untuk meraih kekuasaan. Karena arus-besarnya dapat menerima, maka politik yang membawa masyarakat ke arah Bhinneka Tunggal Ika dominan berkuasa.

Klaim itu terjadi karena ada tangan-tangan kekuasaan yang membagi sektor atau wilayah Negara, apabila bermasalah dengan negara lain maka kita mudah bersatu. Akan tetapi, di level Provinsi hingga Kota yang mengemuka masalah primordialisme. Kiranya ke depan isu-isu primordialisme akan meluntur, perkembangan sekarang sekolah-sekolah negeri sudah banyak menerima keturunan Tionghwa berkat politik keterbukaan.

Kemunculan *stereotype* seperti orang Padang pebisnis kuat sudah mencair, karena interaksi telah membuka ruang kebersamaan. Seperti misi yayasan Khong Kauw Hwee ingin mempersempit *gap* di bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan itu dapat dijembatani lewat pendidikan. Mendidik orang menjadi manusia seutuhnya, tidak dapat dengan cara membedakan. Padahal sektarianisme (Agama) masih kuat sekali, sebagai akibat dari keyakinan yang berbeda karena Guru-besar spiritualnya berbeda. Sungguhpun ajaran bernilai universal, seperti “Kasihilah sesamamu ...” tetapi dipahami hanya dalam lingkungan kelompoknya. Pada intinya disharmoni terjadi karena politik, dan status agama seorang keturunan Tionghwa berubah misalnya dari Konghucu menjadi Budhis atau Kristen pada masa Orde Baru itu lebih karena faktor kekuasaan politis, bukan karena iman kepercayaan.

3.3 Perekat Multikulturalisme

3.3.1 Analisis Akar dan Solusi Konflik

Masalah konflik etnis merupakan satu hal yang disayangkan, dalam kacamata tertentu adanya konflik etnis mengindikasikan bahwa masyarakat kita dalam kondisi sakit. Masyarakat kita masih belum selesai dengan dirinya sendiri, dalam terminologi Psikologi itu berarti belum menunjukkan kedewasaan yang penuh. Adanya konflik menjadi penanda pula, bahwa ada kesewenang-wenangan dalam menunjukkan identitas dirinya jauh lebih unggul daripada etnis yang lain.

Menurut Romo Marcellinus Tanto Pr. (35 tahun) ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya (atau menjadi pemicu) konflik etnis. *Pertama*, kesadaran bahwa kita berbeda satu

sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat intelektualitas seseorang terutama dalam menghadapi perbedaan. Pola pikir seseorang yang terbatas seringkali memicu bahwa yang namanya berbeda (dalam hal ini etnis) adalah seorang yang lain dari mereka, atau bukan kelompok mereka. Tingkat pendidikan seseorang tanpa disadari membentuk perilaku demikian.

Kedua, kehadiran Pemerintah dalam penanganan konflik etnis yang terjadi. Konflik etnis yang telah terjadi dan tidak ditangani sampai ke faktor pemicunya apa dan siapa, akan menimbulkan sebuah opini bahwa berkonflik adalah hal biasa karena tidak ada penanganan sampai ke akar. Pembiasaan bahwa konflik etnis adalah hal yang wajar menyebabkan pola perilaku yang akan terulang kembali. Pelaku konflik akan dengan mudah memicu konflik lagi, karena tidak ada konsekuensi berat yang harus ditanggung ketika memicu konflik.

Ketiga, adanya beberapa aturan perundang-undangan dari Pemerintah yang cenderung menimbulkan konflik itu sendiri. Sebut misalnya tata aturan tentang budaya Tionghwa yang dilarang oleh rezim Orde Baru, menimbulkan aneka gejolak dimana pemerintah seakan-akan memminoritaskan etnis Tionghwa. Kendati sejak era kepemimpinan Gus Dur undang-undang tersebut sudah dicabut.

Keempat, faktor pendidikan sejak usia dini. Pola perilaku yang membeda-bedakan akan tumbuh dengan subur jika sejak usia dini tidak diberi pemahaman bahwa kita manusia berbeda satu sama lain, dan konsekuensinya harus saling menaruh hormat. Pola pikir bahwa kita berbeda yang tidak ditanamkan di usia dini akan membentuk karakter seseorang bahwa berbeda itu tidak baik. Perbedaan dipandang bukan sebagai sesuatu hal yang memperkaya, tetapi memiskinkan kehidupan bersama.

Resolusi konflik etnis belum sepenuhnya tepat, berdasarkan pengamatan selama ini, konflik etnis kadang diselesaikan dengan tindakan tegas oleh aparat militer. Kasus konflik etnis di Papua misalnya, sejauh diketahui bahwa penyelesaian harus bersinergi dengan tokoh agama, aparat pemerintah, tokoh budaya, dan aparat keamanan setempat. Masing-masing konflik etnis mempunyai kekhasan tersendiri. Kasus di Papua masalah adat-istiadat yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lain harus diselesaikan dengan kerjasama sinergis antara pihak lokal yaitu aparat keamanan. Tokoh adat harus didengarkan suaranya, demikian pula dengan pemimpin agama setempat. Kadang mereka tidak mau didamaikan oleh aparat keamanan, tetapi lebih taat kepada kepala adat maupun pemimpin agama. Kata kunci penyelesaian konflik yang sudah terjadi adalah kerjasama sinergis antara pihak pemerintah, keamanan, pemimpin suku dan pemuka agama setempat.

Bagaimana kemungkinan pencegahan konflik melalui akulturasi? Kiranya hal ini menjadi salah satu alternatif pencegahan konflik yang dapat diupayakan. Hal yang harus disadari bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai keragaman baik suku, budaya, agama, bahasa dan lain-lain. Kita ini hidup di negara yang majemuk. Nusantara itu ada lebih dahulu daripada Indonesia, maka gaya hidup yang sudah tertanam dalam tradisi-tradisi lokal itu seakan sudah *patent* tertanam dalam hidup keseharian masyarakat. Kehadiran budaya dari etnis lain atau agama lain seringkali ada resistensi karena ketidaksiapan untuk menerima unsur asing tersebut.

Akulturasi sebagai metode penerimaan dan pembauran budaya menjadi salah satu alternatif pencegahan konflik. Hal ini dimungkinkan karena alasan berikut ini. *Pertama*, akan ada usaha perjumpaan dua budaya atau lebih dalam suatu masyarakat. Pembauran budaya ini akan membuka mata dan kehidupan masyarakat, bahwa bukan hanya ada budayanya sendiri tetapi ternyata ada budaya lain pula. Selanjutnya akan terjadi proses pembelajaran masyarakat terhadap budaya “baru” yang dijumpainya. Lambat laun, pembelajaran budaya ini akan mengubah pola pikir masyarakat sehingga mencapai pemahaman bahwa kita itu beragam.

Kedua, budaya itu indah dan menarik, sehingga tidak heran apabila terdapat gelar budaya dari aneka latar belakang masyarakat dengan agama, etnis atau golongan tertentu akan memunculkan kebersatuan dan tidak lagi memandang sekat-sekat yang ada. Contoh menarik di Kulon Progo Yogyakarta anak-anak muda Katholik memprakarsai gelar budaya. Banyak sekali unsur budaya yang ditampilkan dalam bentuk kesenian rakyat. Kesenian rakyat ini menyatukan masyarakat untuk menikmatinya dan tidak mempersoalkan kembali identitas sebagai agama tertentu, golongan tertentu maupun etnis tertentu.

Ketiga, kesempatan perayaan budaya dari etnis tertentu yang dirayakan dan diekspos media serta mengikut-sertakan etnis lain akan meretas pula sekat-sekat etnis yang hidup dan tinggal dalam masyarakat tertentu. Misalnya di kawasan Pecinan Semarang, pada saat perayaan Imlek bukan hanya diikuti oleh etnis Tionghwa tetapi ini menjadi perayaan bersama dari etnis Jawa maupun etnis yang lain.

Menurut pandangan Lie Han Hwa bahwa Revolusi mental kemungkinan gagal, karena yang wajar adalah evolusi: proses pembelajaran melalui pendidikan. Revolusi akan menimbulkan konflik, karena mengharuskan orang-orang apalagi yang pintar untuk berubah itu sulit dilakukan. Inti pendidikan adalah membangun karakter, sehubungan dengan itu perlu dikritisi apakah perubahan kurikulum K-13 sudah dengan persiapan segalanya.

3.3.2 Pola Komunikasi

Toleransi adalah satu hal yang harus menjadi kosakata dalam hidup masyarakat, pada gilirannya pola komunikasi yang toleran perlu dikembangkan. Bangsa Indonesia sudah semakin sadar akan semangat dan sikap toleran ini, karena menyadari bahwa kita ini beragama. Edukasi terus-menerus akan toleransi ini perlu semakin digemakan dalam ruang-ruang pendidikan, ruang keluarga, ruang-ruang ibadat maupun aneka macam perjumpaan yang menyangkut banyak orang.

Akan tetapi, tampaknya manusia sulit belajar dari pengalaman sejarah. Sulit memahami perbedaan untuk level manusia yang “sadar perubahan”. Justru orang sederhana yang lebih mengerti perbedaan. Kuncinya terletak pada kemampuan kita untuk membaur. Ketika pendatang mampu menghilangkan kecurigaan, maka akan diterima sebagai bagian dari mereka. Sebaliknya, bila kekuasaan merubah budaya maka akan menimbulkan konflik.

3.3.3 Nilai Budaya

Semangat ke-Indonesia-an yang sudah tercantum dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945 menjadi bahasa universal bagi masyarakat untuk menamamkan dan mewujudkan multikulturalisme ini. Sehubungan dengan itu, pilar-pilar kebangsaan Indonesia harus ditegakkan dan menjadi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, peran penting Pemerintah pusat hingga Daerah untuk terus-menerus memberikan edukasi tentang nilai ke-Indonesia-an ini bagi masyarakat.

Rekayasa untuk membangun model pemukiman multikultural ideal sangat dimungkinkan. Model pemukiman di lingkungan kita sebagian besar sudah multikultur, pertimbangan masyarakat memilih tempat tinggal bukan lagi masalah etnisitas atau keagamaan tetapi lebih pada faktor ekonomi. Pilihan pemukiman dengan pertimbangan secara ekonomi terjangkau, akses ke tempat kerja cepat, dan sebagainya. Publikasi tentang contoh pemukiman yang multikultur di media baik cetak maupun elektronik serta dunia maya melalui media sosial akan semakin meyakinkan bahwa pemukiman multikultur merupakan sesuatu yang baik. Edukasi melalui media ini menjadi hal yang sangat efektif untuk memberikan

kesadaran baru bahwa pemukiman multikultur itu adalah kondisi yang indah untuk diwujudkan.

4. Simpulan

Keberadaan konflik etnis mengindikasikan bahwa masyarakat dalam keadaan sakit, dan masih belum selesai dengan dirinya sendiri, dengan kata lain belum dewasa. Konflik juga menjadi penanda bahwa ada kesewenang-wenangan dalam menunjukkan identitas diri satu etnis yang merasa lebih unggul daripada etnis yang lain. Kunci penyelesaian konflik terletak pada kerjasama sinergis antara pihak Pemerintah, aparat keamanan, pemimpin suku dan pemuka agama setempat.

Akulturasinya sebagai metode penerimaan dan pembauran budaya menjadi satu alternatif pencegahan konflik. Pengalaman para informan berusaha mempertahankan identitas budaya etnis mereka dan pada waktu bersamaan mereka berpartisipasi dalam budaya etnis lain. Multikulturalisme, dengan demikian mereka jadikan pilihan sebagai strategi akulturasi. Pola komunikasi yang toleran dan nilai-nilai filosofis Pancasila perlu dikembangkan dan dibudayakan untuk mewujudkan multikulturalisme dalam membangun Indonesia sebagai rumah kita bersama.

6. Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada Drs. Lie Han Hwa (Pengurus Yayasan Khong Kauw Hwee, Semarang), Hendrik Setiawan (Wirausaha), Ratna Hapsari (Pegawai) dan Romo Marcellinus Tanto, Pr. (Pastor di Paroki Kebon Dalem, Semarang) atas kesediaannya menjadi narasumber.

Daftar Pustaka

- Alkatiri, Zeffry, Vincentia Irmayanti, Adrianus LG Waworuntu. 2015. "The Failure of Indonesian Integration in the Reformation Era: a Case of Semarang's Chinese Community". *International Journal of Social Sciences Studies* Vol. 3, No.2, March 2015.
- Bank, Magnus. 2005. *Ethnicity: anthropological constructions*. New York: Routledge.
- Berry, J. W. 2003. "Conceptual approaches to acculturation". In K. M. Chun, P. Balls Organista, & G. Marín (Eds.), *Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Gupta, Akhil and James Ferguson. 1997. "Culture, Power, Place: Ethnography at the End of an Era". *Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology*. Durham: Duke University Press.
- Heckmann, Friederich. 1993. "Multiculturalism Defined Seven Ways". *The Social Contract. Summer 1993*.
- Padilla, A. M. 1980. "The Role of Cultural Awareness and Ethnic Loyalty in Acculturation." *Acculturation Theory, Models and Some New Findings*, ed. A. M. Padilla. Boulder, CO: Westview Press.